

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Partai politik adalah alat yang sangat penting dalam perpolitikan suatu negara karena merupakan alat yang penting dalam mencapai tujuan politik. Hal ini sejalan dengan pendapat Weiner dan Lalombara, yang dikutip oleh Rusli Karim dalam bukunya yang berjudul *Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Proses Pasang Surut* menjelaskan bahwa menurut mereka juga partai politik adalah alat yang penting, dan secara keseluruhan berhasil untuk membentuk kekuasaan nasional yang sah. Karena itu kekuasaan otoriter sangat berkepentingan untuk mengorganisir partai politik yang dinilai sebagai alat yang lebih luwes untuk memperoleh dukungan rakyat daripada angkatan darat dan birokrasi.<sup>1</sup>

Adapun dari segi deifinisi, Menurut R. H. Soltau yang dikutip oleh Miriam Budiarjo dalam bukunya yang berjudul *Dasar-dasar Ilmu Politik*, menjelaskan bahwa partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.<sup>2</sup>

Menurut Sigmund Neumann yang dikutip oleh Miriam Budiarjo dalam bukunya yang berjudul *Dasar-dasar Ilmu Politik*, menjelaskan bahwa partai

---

<sup>1</sup> M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Proses Pasang Surut*, (Jakarta: CV Rajawali, 1993), hlm. 53.

<sup>2</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 161.

politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berdeda.<sup>3</sup>

Menurut Mark N. Hugopian yang dikutip oleh Abdul Mukhtie Fajar dalam bukunya yang berjudul *Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, menjelaskan bahwa partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk memengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan.<sup>4</sup>

Sedangkan menurut Carl Friedrich yang dikutip oleh Ramlan Subakti dalam bukunya yang berjudul *Memahami Ilmu Politik*, menjelaskan bahwa partai politik adalah kelompok manusia yang terorganisasikan secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan kekuasaan itu akan memberikan kegunaan materiil dan idiiil kepada para anggotanya.<sup>5</sup>

Berdasarkan berbagai definisi dari para ahli mengenai partai politik, saya mengambil kesimpulan bahwa partai politik adalah satu kesatuan kelompok manusia yang terorganisir, dengan memiliki kepentingan ideologis tertentu yang

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 162.

<sup>4</sup> Abdul Mukhtie Fajar, *Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 13-14.

<sup>5</sup> Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Grasindo, 1992), hlm. 116.

bertujuan menguasai atau mempertahankan pemerintahan dengan merebut dukungan rakyat.

Partai politik yang terorganisir baru muncul pada akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19 di negara-negara Eropa Barat. Walaupun partai politik yang terorganisir baru muncul pada sekitar pergantian abad ke-18 ke abad ke-19 lalu, akan tetapi ternyata perkembangannya cukup pesat. Partai politik menyebar sehingga dapat dijumpai di hampir seluruh negara di dunia. Dan agaknya sulit mencari negara yang tidak ada partai politiknya.<sup>6</sup>

Begitu pula dengan Partai politik di Indonesia, sudah ada sejak awal abad ke-20 yang diawali oleh organisasi yang mencantumkan asas dan tujuannya dalam kartu anggotanya. Pada mulanya Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta belum mengutamakan di bidang politik. Anjuran Dokter Wahidin Sudirohusodo tersebut masih menekankan pada bidang pendidikan dan pengajaran. Sebagai “perintis” organisasi dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Oleh karena itu usaha Dokter Wahidin adalah mengadakan *studiefonds*. Usaha ini merupakan suatu rintisan untuk mengadakan organisasi yang lebih luas dari soal pengajaran saja. Ini merupakan ciri khas perjuangan melawan penjajah dan merupakan perubahan dari wujud perlawanan bersenjata menjadi perlawanan yang lebih menekankan pada bentuk organisasi yang lebih maju, yaitu menggunakan perlawanan yang terdapat di negeri Barat juga. Perkembangan menjadi lebih pesat tatkala *Indische Partij* (IP)

---

<sup>6</sup> Haryanto, *Partai Politik: Suatu Tinjauan Umum*, (Yogyakarta: Liberty, 1984), hlm. 1.

memperjuangkan “Kemerdekaan Indonesia” berdasarkan kebangsaan *Indierschap*.<sup>7</sup>

Partai politik di Indonesia melewati berbagai masa pemerintahan dari mulai Orde Lama , Orde Baru sampai dengan era Reformasi. Dari ke-3 masa itu bermunculan partai-partai politik di Indonesia dengan beragam azas dan tujuannya masing-masing. Dan pada setiap masa pemerintahan punya ciri khas-nya masing-masing dalam mengatur partai.

Tahun 1998 merupakan tahun yang sangat penting bagi sejarah politik Indonesia. Karena bangkitnya gerakan mahasiswa yang menuntut presiden saat itu Soeharto untuk mundur dari jabatannya. Peristiwa sejarah ini diwarnai dengan unjuk rasa dimana-mana, pembentukan kelompok dan *istighosah* (do’a bersama) agar Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Peristiwa ini bahkan menelan korban jiwa yang salah-satu peristiwa ini dikenal dengan tragedi trisakti yang menewaskan 4 mahasiswa.<sup>8</sup> Tragedi berdarah ini menandai gugurnya pahlawan-pahlawan reformasi, dan berangkat dari sini mahasiswa tidak mundur. Akan tetapi malah semakin berani agar perjuangan pahlawan-pahlawan yang telah gugur tidak menjadi sia-sia.

Pada tanggal 21 Mei 1998 dari Istana Merdeka, Presiden Soeharto berpidato pada jam 09.05, yang intinya mengumumkan pengunduran dirinya sebagai presiden RI. Pidato ini disiarkan oleh seluruh stasion televisi, sehingga

---

<sup>7</sup> P. K. Poerwantana, *Partai Politik di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hlm. 6-7.

<sup>8</sup> Diro Aritonang, *Runtuhnya Rezim daripada Soeharto*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hlm. 189-190.

seluruh rakyat dapat melihat pidato ini di seluruh wilayah di Indonesia.<sup>9</sup> Mundurnya Soeharto dari jabatan Presiden RI ini menandai berakhirnya masa Orde Baru, digantikan dengan era Reformasi.

Berakhirnya masa Orde Baru yang kemudian diganti dengan era Reformasi ini menimbulkan efek yang luar biasa, terutama dalam ranah politik di Indonesia pada tahun 1998. Demokrasi yang seakan-akan ‘dipenjarakan’ pada masa Orde Baru kini menunjukkan taringnya. Dibuktikan dengan pendirian partai politik yang tumbuh di Indonesia bagaikan jamur di musim hujan, lebih dari 100 partai politik lahir pasca berakhirnya Orde Baru.<sup>10</sup> Hal ini menjadi bukti kebebasan berdemokrasi telah bangkit kembali di Indonesia, karena pada masa Orde Baru partai politik dibatasi jumlahnya, yakni hanya 3 partai. Hal ini berdasarkan keputusan MPR pada tahun 1971, yang mengharuskan adanya peleburan partai-partai lain ke dalam satu partai tertentu.<sup>11</sup>

Situasi politik yang tidak stabil pasca Orde Baru runtuh menjadi bahan perbincangan dan diskusi berbagai organisasi di Indonesia, salah satunya oleh Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI). Forum ini adalah Ormas Islam tingkat nasional yang didirikan pada 27 Jumadil Akhir 1414 H/ 11 Desember 1993, yang bertujuan memperjuangkan dan melestarikan aqidah ummat Islam Indonesia. FUI ini mengembangkan peran politiknya menjadi lebih luas dalam rangka menyuarakan aspirasi umat. Maka pada 12 Mei 1998 disepakati agar FUI dikembangkan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 206-207.

<sup>10</sup> Azian Tamin dkk., *Profil Politik Indonesia Pasca Orde Baru*, (Jakarta: Grafika Indah, 2005), hlm. 22.

<sup>11</sup> Zainak Abidin Amir, *Peta Islam Politik Pasca Soeharto*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2003), hlm. 53.

menjadi Badan Koordinasi Umat Islam (BKUI). BKUI ini dibidani oleh tokoh-tokoh yang mewakili sebelas organisasi daerah dan ormas Islam tingkat nasional. Sebelas organisasi itu adalah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI), Forum Silaturahmi Habaib dan Tokoh Masyarakat (FSUHTM), Forum Ukhuwah Islamiyah Indonesia (FUI), Persatuan Islam (PERSIS), Sarekat Islam (PSII), Persatuan Umat Islam (PUI), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), AL Irsyad Al Islamiyah (Al Irsyad) dan Komite Untuk Solidaritas Dunia Islam (Kisdi).<sup>12</sup>

BKUI keanggotaannya semakin berkembang, dengan bergabungnya Muhammadiyah, PMII, HMI dll.. Seiring dengan perkembangannya yang terus pesat. Atas respon terhadap kondisi politik di Indonesia pasca Orde Baru, pada tanggal 10 juni 1998 diadakan rapat di rumah tokoh BKUI, Anwar Harjono. Kemudian berlanjut dengan kesepakatan pada 17 Juli 1998 untuk mengikrarkan berdirinya Partai Bulan Bintang.<sup>13</sup>

Jum'at, tanggal 23 Rabi'ul Awwal 1419 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 17 Juli 1998 disepakati sebagai hari lahirnya Partai Bulan Bintang.<sup>14</sup> Meskipun diumumkan kepada publik baru 9 hari setelahnya. Yakni pada tanggal 26 Juli 1998.<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Azian Tamin dkk., *Op. Cit.*, hlm. 144-145.

<sup>13</sup> Azian Tamin dkk., *Op. Cit.*, hlm. 146-147

<sup>14</sup> DPP Partai Bulan Bintang, *Hasil Mukhtamar I Partai Bulan Bintang*, (Jakarta: Partai Bulan Bintang, 2000) hlm. 25.

<sup>15</sup> *KOMPAS*, Edisi 27 Juli 1998, "PBB Dideklarasikan".

Partai ini berasaskan Islam dan bertujuan untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945, mengembangkan kehidupan demokrasi dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tujuan khusus didirikannya partai ini adalah mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, adil dan makmur yang diridloi Allah SWT.<sup>16</sup>

Susunan Partai Bulan Bintang Terdiri dari DPP, DPW, DPC, PAC dan PR. DPP yaitu Majelis Syura', Pimpinan Pusat, dan Anggota Pleno. DPW, yaitu Majelis Pertimbangan Wilayah, Pimpinan Wilayah, dan Anggota Pleno. DPC, yaitu Majelis Pertimbangan Cabang, Pimpinan Cabang, dan Anggota Pleno. PAC, yaitu Pimpinan Anak Cabang. PR, yaitu Pimpinan Ranting.<sup>17</sup>

Tidak lama dari awal berdirinya DPP Partai Bulan Bintang, maka berdirilah DPW dan DPC di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Hal ini membuktikan animo masyarakat Islam khususnya atas pendirian partai yang berazaskan Islam ini. Begitupun halnya dengan DPC Kabupaten Bandung berdiri tidak lama dari didirikannya DPP Partai Bulan Bintang.<sup>18</sup>

Kabupaten Bandung adalah salah-satu basis suara PBB<sup>19</sup>, terbukti dengan mendapatkannya 2 kursi pada Pileg tahun 1999 di Kabupaten Bandung.<sup>20</sup> maka peranan DPC PBB Kab. Bandung dalam menarik simpati ataupun melakukan

<sup>16</sup> DPP Partai Bulan Bintang, *Op. Cit.*, hlm. 25-26

<sup>17</sup> DPP Partai Bulan Bintang, *Op. Cit.*, hlm. 36.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Asep Anwar, laki-laki, 67 tahun, Ketua DPC PBB Kabupaten Bandung: Banjaran (Rumah Kediaman), 11 Oktober 2015. Keterangan ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Eri Ridwan Latief, Laki-laki, 49 tahun, Sekretaris DPC PBB Kabupaten Bandung Periode 1999-2004: Banjaran (Rumah Kediaman), 7 Februari 2016.

<sup>19</sup> Lihat hasil pemilu tahun 1999 di Kabupaten Bandung.

<sup>20</sup> Arsip Pemilu tahun 1999 di Kabupaten Bandung

sosialisasi terhadap masyarakat mengenai PBB pun sangat penting sekali perannya. Kabupaten Bandung merupakan wilayah menjadi basis PBB ini terbukti dengan respon masyarakat Kabupaten Bandung terhadap pendirian DPC Kabupaten Bandung. Hal ini menjadi sangat terlihat jelas ketika pemilu tahun 1999 dilaksanakan, yakni bagaimana peranan masyarakat dalam kampanye PBB memberikan peranan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Pada pemilu 1999 masyarakat Kabupaten Bandung bahkan “udunan” untuk kampanye di wilayah Kabupaten Bandung. Dibuktikan dengan memberi sumbangan-sumbangan bagi kemajuan DPC Kabupaten Bandung baik berupa materi ataupun berupa moril.<sup>21</sup>

Perkembangan yang terjadi di Partai Bulan Bintang terlihat ketika membandingkan hasil pemilu tahun 1999 dan pemilu tahun 2004, yang akan penulis jadikan *sample* tentang perkembangan yang terjadi pada Partai Bulan Bintang. Tahun 1998 mengenai proses berdirinya, adapun tahun 1999 mengenai pemilu, kemudian 2000-2004 akan diteliti mengenai perkembangan yang terjadi pada Partai Bulan Bintang, terutama perbandingan dengan tahun 2004 yang menjadi pemilu berikutnya.

Setelah meneliti perkembangan PBB pada pemilu 1999, menjadi menarik untuk dikaji karena hasil yang didapat PBB yang disebut-sebut sebagai penerus Masyumi (terbukti dengan para sesepuh yang berada dalam partai tersebut) itu, memperoleh hasil yang kecil dan sangat jauh bila dibandingkan dengan apa yang dicapai oleh Masyumi dulu padahal komposisi orang-orang di PBB, sebagian

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bapak Asep Anwar, laki-laki, 67 tahun, Ketua DPC PBB Kabupaten Bandung: Banjaran (Rumah Kediaman), 11 Oktober 2015. Keterangan ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Ahmad Hidayat, laki-laki, 63 tahun, Ketua DPC PBB Kabupaten Bandung 1999-2004: Margaasih (Rumah Kediaman), 26 Oktober 2015.



pernah menjadi pengurus dan kader Masyumi, bahkan ideologi yang diusung partai tersebut sangat mirip dengan apa yang diperjuangkan Masyumi dulu.

Berdasarkan uraian di atas, objek penelitian yang akan penulis angkat yaitu: **“PERKEMBANGAN PARTAI BULAN BINTANG DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 1998-2004”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada :

1. Bagaimana Partai Islam di Kabupaten Bandung tahun 1998?
2. Bagaimana Perkembangan Partai Bulan Bintang di Kabupaten Bandung tahun 1999-2004?

### **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah maka yang menjadi tujuan penelitiannya yaitu :

1. Untuk mengetahui Partai Islam di Kabupaten Bandung tahun 1998.
2. Untuk mengetahui Perkembangan Partai Bulan Bintang di Kabupaten tahun 1999-2004.

### **D. langkah-langkah Penelitian**

Langkah – langkah penelitian yang dipakai dalam penelitian ini ada 4 langkah; 1. Heuristik; 2. Kritik; 3. Interpretasi; 4. Historiografi. Lebih lanjut dijelaskan Louis Gottschalk yaitu: 1). Pengumpulan objek data yang relevan baik

secara tercetak dan tertulis; 2). Pengolahan dan klasifikasi data dengan menyingkirkan bahan-bahan bagian yang dianggap tidak perlu; 3). Pengumpulan kesaksian yang dapat dipercaya; dan 4). Kesaksian yang dapat dipercaya itu menjadi suatu kisah untuk pengkajian yang berarti.<sup>22</sup>

### 1. Heuristik

Tahapan pertama dalam penelitian sejarah adalah tahapan heuristik. Heuristik berasal dari bahasa Yunani, *heuriskein*. Artinya *to find* yang berarti tidak hanya menemukan, tetapi mencari dahulu baru menemukan. Heuristik adalah proses mencari untuk menemukan sumber-sumber.<sup>23</sup>

Dalam tahapan yang pertama ini, penulis berusaha untuk mengumpulkan seluruh sumber yang berkaitan dengan judul yang sedang penulis teliti. Langkah pertama yang penulis ambil dalam pencarian sumber, yakni mencari langsung ke tokoh-tokoh Partai Bulan Bintang PBB yang terlibat dalam kegiatan partai interval tahun 1998-2004. Tokoh pertama yang penulis kunjungi adalah H. Asep Anwar, beliau adalah salah satu pendiri Partai Bulan Bintang tingkat pusat dan pendiri DPC Kabupaten Bandung. Beliau juga pernah menjabat sebagai ketua DPC PBB Kabupaten Bandung. Selain informasi berupa wawancara, penulis mendapatkan beberapa sumber primer dan sekunder berupa Hasil Mukercab I Partai Bulan Bintang Kabupaten Bandung, Buku Hasil Muktamar I PBB, Hasil Muktamar II PBB, Hasil Muktamar III PBB, Prinsip dan Tuntunan Musyawarah PBB.

---

<sup>22</sup> Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), hlm. 23-24.

<sup>23</sup> Aam Abdillah, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 29.

Dalam proses pencarian dan pengumpulan sumber, penulis juga mencari ke beberapa perpustakaan, seperti perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora UIN BDG, Perpustakaan UIN Bandung, Perpustakaan Daerah Jawa Barat dan Perpustakaan Batu Api Jatinangor. Selain mencari ke perpustakaan, penulis juga mencari sumber ke BAPUSIPDA, ke Kantor KPU Kabupaten Bandung dan Badan lain yang berkaitan dengan sumber yang penulis cari. Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya dan selengkap-lengkapnnya referensi, agar materi yang disajikan nantinya bisa merujuk pada fakta-fakta yang kuat dan bersumber.

Adapun sumber primer berupa sumber lisan, penulis berhasil mewawancarai beberapa orang pengurus sekaligus deklarator PBB cabang Kabupaten Bandung, di antaranya:

1. Bapak Ahmad Hidayat, laki-laki, 63 tahun, sebagai ketua DPC PBB dan Kader PERSIS di Kabupaten Bandung tahun 2000-2004. Adapun sekarang menjabat sekarang Dewan Pembina PBB wilayah Jawa Barat. Wawancara ini dilakukan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 di rumah kediaman beliau di Desa Jelegong, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung.
2. Bapak H. Asep Anwar, laki-laki, 67 tahun, sebagai ketua DPC PBB Kabupaten Bandung tahun 2010-2015. Wawancara ini dilakukan pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 di rumah kediaman beliau di Kp. Cirengit, Ds. Cangkuang, Kec. Banjaran, Kabupaten Bandung.

3. Bapak H. Damini, laki-laki, 62 tahun, sebagai Kader PUI dan Bendahara DPC PBB Kabupaten Bandung tahun 1998. Wawancara ini dilakukan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 di rumah kediaman beliau di Ds. Katapang, Kec. Katapang, Kab. Bandung.
4. Bapak Eri Ridwan Latief, laki-laki, 49 tahun, sebagai Sekretaris DPC PBB Kabupaten Bandung periode 1999-2004 dan Anggota DPRD Kabupaten Bandung Periode 1999-2004. Wawancara ini dilakukan pada Hari Minggu Tanggal 7 Februari 2016 di rumah kediaman beliau di Desa Ciapus, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung.
5. Bapak Abdurrachim Santosa, laki-laki, 50 tahun, sebagai Sekretaris DPC PBB Kab. Bandung tahun 1998-1999, Kader Muhammadiyah, Wakil Ketua DPC PBB Kabupaten Bandung periode 1999-2004 dan Anggota DPRD Kab. Bandung 1999-2009. Wawancara ini dilakukan di tempat kerja beliau di Kecamatan Cileunyi Bandung.

Sumber sekunder dalam bentuk koran dan arsip, di antaranya adalah KOMPAS, Pikiran Rakyat, Republika yang penulis dapatkan dari BAPUSIPDA Jawa Barat. Arsip hasil pemilu penulis dapatkan dari KPU Kabupaten Bandung.

Rincian sumber tertulis yang berupa arsip dan koran yang berhasil penulis dapatkan, sebagai berikut:

- a. Hasil Musyawarah Kerja Cabang I Partai Bulan Bintang Kabupaten Bandung tahun 2000

- b. SK Kepengurusan DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Bandung  
Periode 2000 - 2005
- c. Arsip Hasil Pemilu di Kabupaten Bandung tahun 1999 dan 2004
- c. Hasil Muktamar I Partai Bulan Bintang tahun 2000
- c. Hasil Muktamar II Partai Bulan Bintang tahun 2005
- d. Hasil Muktamar III Partai Bulan Bintang tahun 2010
- e. Prinsip dan Tuntunan Musyawarah Partai Bulan Bintang
- f. *Kompas*, 23 Juli 1998, “Peta Partai Politik di Masa Depan Tampak Makin Jelas”
- g. *Kompas*, 27 Juli 1998, “Partai Bulan Bintang Dideklarasikan”
- h. *Kompas*, 4 Agustus 2004, “Wajah Baru Dominasi DPR 2004”
- i. *Republika*, 25 Juli 1998, “Yusril Pimpin Partai Bulan Bintang”
- j. *Republika*, 27 Juli 1998, “Partai Bulan Bintang Ingin Presiden Dipilih Langsung”
- k. *Pikiran Rakyat*, 8 Desember 2003, “24 Partai Ikuti Pemilu 2004”
- l. *Pikiran Rakyat*, 9 Desember 2003, “Pemilu 2004 Ajang Kebangkitan Umat Islam”
- m. *Pikiran Rakyat*, 9 Desember 2003, “Parpol Terima Nomor”

Sumber-sumber lain yang penulis gunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah:

- 1). Azian Tamin dkk., 2005, *Profil Politik Indonesia Pasca Orde Baru*, Jakarta: Grafika Indah.
- 2). Bambang Setyo, 2000, *Simpul-simpul Perjuangan Islam di Indonesia: Sejarah Kelahiran dan Kiprah Partai Bulan Bintang*, Bandung: DPP PBB.
- 3). Bambang Setyo, 2005, *Sejarah Kebangkitan dan Kiprah Partai Bulan Bintang*, Jakarta: DPP PBB.
- 4). Kamarudin. 2003. *Partai Politik Islam di Pentas Reformasi Refleksi Pemilu 1999 untuk Pemilu 2004*. Jakarta: Visi Publishing.
- 5) Musa Kazhim, 1999, *5 Partai dalam Timbangan*, Bandung: Pustaka Hidayah.
- 6). Tumpal Daniel S., 2005, *Masa Sulit Mengibarkan Panji Bulan Bintang*, Jakarta: Tudiskalam.
- 7). Zainak Abidin Amir, 2003, *Peta Islam Politik Pasca Soeharto*, Jakarta: Pustaka LP3ES.

## 2. Kritik

Tahapan kedua yang dilakukan setelah tahapan heuristik, adalah tahapan kritik. Pada dasarnya, tahapan kritik yakni menentukan keotentikan sumber dan mengklasifikasikan sumber primer dan sumber sekunder. Menurut Kuntowijoyo,

kritik yang disebut juga verifikasi atau kritik sumber atau keabsahan sumber, ada dua macam yaitu otentisitas atau keaslian sumber melalui proses kritik ekstern dan kredibilitas atau dipercaya yaitu dengan kritik intern. Yang intinya adalah kritik ekstern dilakukan untuk memperoleh sumber yang otentik. Sedangkan kritik intern dilakukan untuk memperoleh sumber yang kredibel.<sup>24</sup> Tahapan ini ada dua macam, yaitu:

a. Kritik Ekstern

Kritik ekstern atau kritik luar untuk menilai otentisitas sumber sejarah. Sumber yang otentik tidak mesti harus sama dengan sumber dan isi tulisan dalam dokumen harus sembunyi dan sama dengan sumber aslinya, baik menurut isinya tidak boleh dipalsukan, tetapi otentisitasnya belum tentu memberi jaminan untuk dapat dipercaya. Dalam kritik ekstern dipersoalkan bahan dan bentuk sumber, umur, dan, asal dokumen, kapan dibuat, dibuat oleh siapa. Sumber itu asli atau salinan, dan masih utuh atukah sudah berubah.<sup>25</sup>

Sumber Lisan

Pengujian terhadap pengkisah (*interviewer*) dengan melakukan inventarisasi dan seleksi pengkisah. Inventarisasi difahami sebagai proses penyusunan daftar pengkisah sesuai dengan derajat perannya dalam peristiwa sejarah serta perluasan daftar pengkisah yang akan digali sejarah lisannya.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu sejarah*, (Yogyakarta: Bentang, 2005), hlm. 101.

<sup>25</sup> Ismaun, *Sejarah Sebagai Ilmu*, (Bandung: Hisoria Utama Press, 2005), hlm. 50.

<sup>26</sup> Reiza D. Dienaputra, *Sejarah Lisan*, (Bandung: Minor Book, 2006), hlm. 48.

Setelah inventarisasi dilakukan, maka dilakukanlah seleksi pengkisah. Secara garis besar, ada dua hal yang diperhatikan dalam seleksi pengkisah ini, yaitu usia dan kesehatan mental.<sup>27</sup> *Pertama*, usia menjadi hal yang penting untuk diperhatikan, karena dalam sejarah lisan haruslah sumber primer yang dijadikan sebagai pengkisah. Sumber primer yang dimaksud adalah orang yang mengalami sendiri peristiwa sejarah. Misalkan kejadian yang diteliti adalah tahun 1998, maka minimum orang yang menjadi pengkisah lahir pada tahun 1981. Dengan kata lain, pada kejadian tersebut pengkisah sudah dewasa secara usia.

*Kedua*, berkait dengan kesehatan mental. Kesehatan mental menjadi persyaratan penting selanjutnya yang perlu dimiliki pengkisah hal itu tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menyampaikan sejarah lisan, tetapi juga berkaitan erat dengan kemampuan untuk mengingat peristiwa-peristiwa sejarah terpilih yang ada di dalam memorinya. Dengan demikian, apabila seorang pengkisah sudah jelas-jelas tidak sehat secara mental, maka ia harus dikeluarkan dari daftar pengkisah yang akan digali sejarah lisannya.<sup>28</sup>

Adapun kritik ekstern terhadap sumber lisan adalah mengamati aspek eksternal pengkisah. Khusus dalam sumber lisan, penulis melakukan kritik ekstern yaitu melakukan wawancara dengan:

1. Bapak Ahmad Hidayat, laki-laki, 63 tahun, sebagai ketua DPC PBB Kabupaten Bandung tahun 2000-2004 dan Kader Persatuan Islam (PERSIS). Adapun sekarang menjabat sekarang Dewan Pembina PBB

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 49.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 49-50.



wilayah Jawa Barat. Kondisi beliau masih sehat, kata-kata dan intonasinya masih jelas. Ingatannya pun cukup kuat, terbukti dengan lancarnya penuturan pengisah tanpa adanya upaya mengingat secara mendalam. Beliau ini termasuk sumber primer, karena hidup pada zaman berdirinya PBB sekaligus menjadi ketua PBB di Kabupaten Bandung pada tahun 2000-2004.

2. Bapak H. Asep Anwar, laki-laki, 67 tahun, sebagai ketua DPC PBB Kabupaten Bandung tahun 2010-2015. Meskipun usianya sudah tidak muda lagi, akan tetapi secara fisik beliau masih sehat. Adapun penuturan kisahnya dari awal sampai akhir lancar dan jelas tidak ada masalah. Ingatannya masih kuat, terbukti dengan kelancarannya bercerita dan emosi yang ia keluarkan ketika menuturkan kisahnya seolah-olah ia baru kemarin menjabat sebagai ketua DPC PBB Kabupaten Bandung. Beliau termasuk sumber primer karena beliau hidup di zaman berdirinya PBB, bahkan beliau sendiri salah-satu pendiri PBB pusat dan PBB di Kabupaten Bandung.

3. Bapak H. Damini, laki-laki, 62 tahun, sebagai Kader PUI dan Bendahara DPC PBB Kabupaten Bandung tahun 1998. Bapak H. Damini secara fisik masih sehat, terlihat jelas dari kegiatan di kediamannya dan sikapnya selama wawancara menunjukkan seseorang yang masih bugar meskipun di usia yang bisa dibilang tidak lagi muda. Penuturan kisahnya pun lancar, menandakan ingatannya tidak habis dimakan usia. Bapak H. Damini ini termasuk sumber primer, karena beliau hidup di

masa pendirian dan perkembangan PBB di Kabupaten Bandung, dan beliau pun menjabat sebagai bendahara di DPC PBB Kabupaten Bandung. Selain itu dalam menjelaskan respon PUI terhadap pendirian PBB di Kabupaten Bandung tahun 1998, beliau juga termasuk sumber primer.

4. Bapak Eri Ridwan Latif, laki-laki, 49 tahun, sebagai sekretaris DPC PBB Kabupaten Bandung periode 1999 – 2004 dan anggota DPRD Kabupaten Bandung 1999-2004. Bapak Eri secara fisik masih terlihat sehat, dengan suara yang tegas dan lancar, dari sikapnya selama wawancara berlangsung tidak nampak ciri-ciri orang yang sakit. Beliau tampak segar dan sehat, meskipun usianya tidak muda lagi. Beliau menuturkan kesaksiannya dengan lancar tanpa ada kesulitan untuk mengingat memorinya. Bapak Eri ini termasuk sumber primer, karena beliau hidup pada masa pendirian, menjadi pelaku, dan terus mengikuti kegiatan-kegiatan PBB di Kabupaten Bandung, sekaligus menjadi sekretaris pada periode 1999-2004.
5. H. Abdurrachim Santosa, laki-laki, 50 tahun, sebagai sekretaris DPC PBB Kab. Bandung tahun 1998-1999, Kader Muhammadiyah, wakil ketua DPC PBB Kabupaten Bandung 1999-2004 dan anggota DPRD Kab. Bandung 1999-2009. Bapak Santosa secara fisik masih terlihat sehat, dengan suara yang tegas dan lancar, dari sikapnya selama wawancara berlangsung tidak nampak ciri-ciri orang yang sakit. Beliau tampak segar dan sehat, meskipun usianya tidak muda lagi. Beliau

menuturkan kesaksiannya dengan lancar tanpa ada kesulitan untuk mengingat memorinya. Bapak Santosa ini termasuk sumber primer, karena menjadi saksi dan pelaku tentang eksistensi PBB di Kabupaten Bandung, karena faktanya beliau pernah menjadi sekretaris dan wakil DPC PBB Kabupaten Bandung. Beliau juga merupakan kader dari ormas Islam Muhammadiyah.

#### Sumber Tulisan

1. Hasil Musyawarah Kerja Cabang I Partai Bulan Bintang Kabupaten Bandung. Dokumen ini merupakan arsip yang berisi program kerja yang disusun oleh DPC Partai Bulan Bintang Kab. Bandung periode 2000-2005. Kertas masih bagus dijilid rapih dan semua tulisannya masih bisa dibaca. Sumber ini termasuk sumber primer karena diproduksi di tahun yang sama dengan substansinya.
2. SK Kepengurusan DPC PBB Kabupaten Bandung, merupakan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh DPP PBB atas kepengurusan DPC PBB Kab. Bandung periode tahun 2000-2005. Dari segi kertas masih bagus dan sesuai pada zamannya. Adapun untuk tulisan masih bisa dibaca semuanya. Tanggal pembuatan pun sesuai dengan isinya. Sumber ini termasuk sumber primer.
3. Arsip Hasil Pemilu 1999 dan 2004, arsip ini merupakan arsip dari tahun 1999 dan 2004 yang berupa kertas lembaran yang masih dalam keadaan

bagus. Sumber ini termasuk sumber primer, yang kemudian *dipotocopy* oleh penulis sebagai sumber penguat.

4. Hasil Muktamar I Partai Bulan Bintang, merupakan buku hasil muktamar I Partai Bulan Bintang. Buku ini masih dalam keadaan bagus, tulisannya masih dapat terbaca dengan jelas, meskipun dicetak pada tahun 2000. Buku ini tergolong sumber primer, karena dari segi pembuatan asli tahun 2000, dan bukan hasil *potocopy*.
5. Hasil Muktamar II Partai Bulan bintang, merupakan buku hasil Muktamar II Partai Bulan Bintang. Buku ini masih dalam keadaan bagus, tulisannya masih bisa dibaca dan dicetak pada tahun 2005. Buku ini tergolong sumber primer, karena dari segi pembuatan asli tahun 2005, merupakan cetakan pertama.
6. Hasil Muktamar III Partai Bulan Bintang, merupakan buku hasil mukatamar III Partai Bulan Bintang. Buku ini masih dalam keadaan bagus, tulisannya masih bisa dibaca dan dicetak pada tahun 2010. Buku ini tergolong sumber sekunder, karena dari segi pembuatan tahun 2010, hanya untuk menjelaskan kondisi PBB terkini.
7. Prinsip dan Tuntunan Musyawarah Partai Bulan Bintang, buku ini tergolong buku saku, karena ukuran dan ketebalannya yang kecil. Dalam kondisi kertas dan jilid yang bagus dan tulisan yang masih terbaca jelas. Buku ini termasuk sumber sekunder.

8. *Kompas*, 23 Juli 1998, “Peta Partai Politik di Masa Depan Tampak Makin Jelas”. Koran ini merupakan koran asli terbitan 23 juli 1998, yang kemudian dipotocopy oleh penulis. Dalam keadaan bagus, kertasnya masih utuh dan tulisannya masih terbaca. Koran ini termasuk sumber primer.
9. *Kompas*, 27 Juli 1998, “Partai Bulan Bintang Dideklarasikan”. Koran ini merupakan koran asli terbitan 27 juli 1998, yang kemudian dipoto oleh penulis. Dalam keadaan bagus, kertasnya masih utuh dan tulisannya masih terbaca. Koran ini termasuk sumber primer.
10. *Kompas*, 4 Agustus 2004, “Wajah Baru Dominasi DPR 2004”. Koran ini merupakan koran asli terbitan 4 Agustus juli 2004, yang kemudian dipotocopy oleh penulis. Dalam keadaan bagus, kertasnya masih utuh dan tulisannya masih terbaca. Koran ini termasuk sumber primer.
11. *Republika*, 25 Juli 1998, “Yusril Pimpin Partai Bulan Bintang”. Koran ini merupakan koran asli terbitan 25 juli 1998, yang kemudian dipoto oleh penulis. Dalam keadaan bagus, kertasnya masih utuh dan tulisannya masih terbaca. Koran ini termasuk sumber primer.
12. *Republika*, 27 Juli 1998, “Partai Bulan Bintang Ingin Presiden Dipilih Langsung”. Koran ini merupakan koran asli terbitan 27 juli 1998, yang kemudian dipoto oleh penulis. Dalam keadaan bagus, kertasnya masih utuh dan tulisannya masih terbaca. Koran ini termasuk sumber primer.

13. *Pikiran Rakyat*, 8 Desember 2003, “24 Partai Ikuti Pemilu 2004”.

Koran ini merupakan koran asli terbitan 8 Juli 2003, yang kemudian di-*potocopy* oleh penulis. Dalam keadaan bagus, kertasnya masih utuh dan tulisannya masih terbaca. Koran ini termasuk sumber primer.

14. *Pikiran Rakyat*, 9 Desember 2003, “Pemilu 2004 Ajang Kebangkitan

Umat Islam”. Koran ini merupakan koran asli terbitan 9 Desember 2003, yang kemudian di-*potocopy* oleh penulis. Dalam keadaan bagus, kertasnya masih utuh dan tulisannya masih terbaca. Koran ini termasuk sumber primer.

15. *Pikiran Rakyat*, 9 Desember 2003, “Parpol Terima Nomor”. Koran ini

merupakan koran asli terbitan 9 Desember 2003, yang kemudian di-*potocopy* oleh penulis. Dalam keadaan bagus, kertasnya masih utuh dan tulisannya masih terbaca. Koran ini termasuk sumber primer.

#### b. Kritik Intern

Kritik intern atau kritik dalam untuk menilai kredibilitas sumber dengan mempersoalkan isinya, kemampuan pembuatannya, tanggung jawab dan moralnya. Isinya dinilai dengan membandingkan kesaksian-kesaksian di dalam sumber dengan sumber dengan kesaksian-kesaksian dari sumber lain. Untuk menguji kredibilitas sumber (sejauh mana dapat dipercaya) diadakan penilaian intrinsik terhadap sumber dengan mempersoalkan hal-hal tersebut. Kemudian

dipunguti fakta-fakta sejarah melalui perumusan data yang didapat, setelah diadakan penelitian terhadap evidensi-evidensi dalam sumber.<sup>29</sup>

#### 1) Sumber Lisan

Dalam kritik intern, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Ahmad Hidayat, selama wawancara berlangsung beliau dengan lancar menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Beliau menjelaskan mengenai kondisi politik di Kabupaten Bandung sebelum PBB berdiri dan sejarah berdirinya PBB di Kabupaten Bandung dengan baik dan jelas. Dalam konteks pendirian PBB pusat beliau termasuk sumber sekunder. Adapaun untuk konteks pendirian PBB di Kabupaten Bandung dan perkembangannya sampai tahun 2004, beliau termasuk sumber primer. Karena terjun langsung di lapangan dan terbukti dengan penuturan kisahnya yang lancar dan logis tanpa ada unsur dibuat-buat atau berbohong.

Penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Asep Anwar, beliau cukup cakap dalam menjelaskan sejarah berdirinya PBB di pusat maupun di Daerah Kabupaten Bandung. Beliau menjelaskan dengan sangat lancar dan dengan kata-kata yang dapat dimengerti. Beliau menjelaskan tentang perjuangannya bersama yang lainnya dalam mendirikan PBB di Kabupaten Bandung, dan bagaimana melakukan sosialisasi mengenai Partai Bulan Bintang di tengah-tengah masyarakat. Juga menjelaskan tentang kendala dan harapan dalam berpolitik di Partai Bulan Bintang, terutama di daerah Kabupaten Bandung. Beliau ini termasuk sumber primer, karena berperan langsung dalam pendirian dan pengembangan Partai Bulan Bintang.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

Wawancara juga dilakukan kepada Bapak H. Damini, beliau yang berperan dalam mendirikan PBB di Kabupaten Bandung ini masih cukup fasih dalam menjelaskan bagaimana mendirikan Partai Bulan Bintang di Kabupaten Bandung. Dan menjelaskan mengenai kendala-kendala yang harus dihadapi dalam mendirikan Partai Bulan Bintang di Kabupaten Bandung, dan lebih lanjut beliau berkisah tentang respon dari masyarakat Kabupaten Bandung atas pendirian PBB di Kabupaten Bandung. Beliau ini dalam kontes pendirian PBB di Kabupaten Bandung, termasuk sumber primer dan juga pada interval tahun 1998-2000. Dan interval 2000 lebih beliau sudah tidak relevan, karena sudah tidak berada di Partai Bulan Bintang.

Bapak Eri Ridwan Latif, beliau berperan sebagai deklarator sekaligus sekretaris DPC PBB Kabupaten Bandung periode 1999-2004. Beliau cukup fasih dalam menjelaskan bagaimana kondisi politik di Kabupaten Bandung pada tahun 1998. Selain itu beliau juga menjelaskan mengenai awal perjuangan pendirian PBB pusat dan PBB di Kabupaten Bandung, yang kebetulan beliau menjadi saksi sekaligus pelaku dalam peristiwa tersebut. Pak Eri juga menjelaskan tentang perjuangannya sebagai anggota dewan dari faksi PBB dalam memperjuangkan syari'at Islam di Kabupaten Bandung melalui legislatif. Dalam konteks pendirian dan perkembangan PBB di Kabupaten Bandung, beliau termasuk sumber primer.

Bapak H. Abdurrachim Santosa, beliau adalah sekretaris DPC PBB Kabupaten Bandung tahun 1998-1999, juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPC PBB Kabupaten Bandung tahun 1999-2004, dan pernah menjadi anggota DPRD periode 1999-2009. Beliau fasih dalam menjawab semua pertanyaan yang



diajukan oleh pewawancara, beliau menceritakan perjuangannya mendirikan PBB di Kabupaten Bandung bersama kawan-kawannya. Meskipun beliau menjelaskan dengan jawaban-jawaban yang singkat, tapi itu sudah cukup mewakili penjelasan beliau mengenai sejarah pendirian PBB di Kabupaten Bandung, perkembangannya, dan perjuangan beliau menegakan syari'at Islam sebagai wakil PBB di DPRD. Penjelasan beliau mengenai pendirian dan perkembangan PBB di Kabupaten Bandung merupakan informasi yang relevan, karena beliau sebagai saksi dan pelaku. Beliau termasuk sumber primer.

## 2) Sumber Tulisan

1. Hasil Musyawarah Kerja Cabang I Partai Bulan Bintang Kabupaten Bandung. Dokumen ini merupakan arsip yang berisi program kerja yang disusun oleh DPC Partai Bulan Bintang Kab. Bandung periode 2000-2005. Sumber ini termasuk sumber primer karena substansinya berisi muatan program PBB di Kab. Bandung tahun 2000-2005.
2. SK Kepengurusan DPC PBB Kabupaten Bandung, merupakan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh DPP PBB atas kepengurusan DPC PBB Kab. Bandung periode tahun 2000-2005. Sumber ini merupakan sumber primer karena berisi pengurus-pengurus DPC PBB Kab. Bandung pada tahun 2000-2005 yang relevan dengan judul penelitian.
3. Arsip Hasil Pemilu 1999 dan 2004, arsip ini merupakan arsip dari tahun 1999 dan 2004 yang berupa kertas lembaran yang masih dalam keadaan bagus. Berisi tentang hasil pemilu tahun 1999 dan tahun 2004. Sumber

ini termasuk sumber primer, yang kemudian *dipotocopy* oleh penulis sebagai sumber penguat.

4. Hasil Muktamar I Partai Bulan Bintang, merupakan buku hasil muktamar I Partai Bulan Bintang. Berisi tentang AD dan ART Partai Bulan Bintang Hasil Muktamar pertama PBB. Untuk substansinya, dalam konteks PBB pusat, sumber ini tergolong sumber primer. Adapun dalam konteks PBB di Kabupaten Bandung, sumber ini tergolong sumber sekunder.
5. Hasil Muktamar II Partai Bulan Bintang, merupakan buku hasil muktamar II Partai Bulan Bintang. Buku ini tergolong sumber sekunder, dari segi pembuatan dibuat tahun 2005, adapun untuk menjelaskan perkembangan dan prospek PBB pusat buku ini termasuk sumber primer.
6. Hasil Muktamar III Partai Bulan Bintang, merupakan buku hasil mukatamar III Partai Bulan Bintang. Buku ini tergolong sumber sekunder, karena dari segi pembuatan tahun 2015, hanya untuk menjelaskan kondisi PBB terkini.
7. Prinsip dan Tuntunan Musyawarah Partai Bulan Bintang. Buku ini berisi prinsip dasar dalam berpolitik Partai Bulan Bintang dan salah-satu yang menjadi konsep utama dalam pembahasannya adalah mengenai musyawarah. Buku ini termasuk sumber sekunder.

8. *Kompas*, 23 Juli 1998, “Peta Partai Politik di Masa Depan Tampak Makin Jelas”. Koran ini merupakan koran asli terbitan 23 juli 1998, yang kemudian dipotocopy oleh penulis. Berisi tentang peta partai politik yang dikategorikan ke dalam kategori tertentu pada tahun 1998. Untuk substansinya, dalam konteks PBB pusat, sumber ini tergolong sumber primer. Adapun dalam konteks PBB di Kabupaten Bandung, sumber ini tergolong sumber sekunder.
9. *Kompas*, 27 Juli 1998, “Partai Bulan Bintang Dideklarasikan”. Koran ini merupakan koran asli terbitan 27 juli 1998, yang kemudian dipoto oleh penulis. Berisi bukti dideklarasikannya Partai Bulan Bintang. Untuk substansinya, dalam konteks PBB pusat, sumber ini tergolong sumber primer. Adapun dalam konteks PBB di Kabupaten Bandung, sumber ini tergolong sumber sekunder..
10. *Kompas*, 4 Agustus 2004, “Wajah Baru Dominasi DPR 2004”. Koran ini merupakan koran asli terbitan 4 Agustus juli 2004, yang kemudian dipotocopy oleh penulis. Berisi tentang hasil pemilu legislatif 2004. Untuk substansinya, dalam konteks PBB pusat, sumber ini tergolong sumber primer. Adapun dalam konteks PBB di Kabupaten Bandung, sumber ini tergolong sumber sekunder.
11. *Republika*, 25 Juli 1998, “Yusril Pimpin Partai Bulan Bintang”. Koran ini merupakan koran asli terbitan 25 juli 1998, yang kemudian dipoto oleh penulis. Berisi tentang Yusril yang memimpin Partai Bulan

Bintang hasil musyawarah. Untuk substansinya, dalam konteks PBB pusat, sumber ini tergolong sumber primer. Adapun dalam konteks PBB di Kabupaten Bandung, sumber ini tergolong sumber sekunder..

12. *Republika*, 27 Juli 1998, “Partai Bulan Bintang Ingin Presiden Dipilih Langsung”. Koran ini merupakan koran asli terbitan 27 juli 1998, yang kemudian dipoto oleh penulis. Berisi keinginan Partai Bulan Bintang dalam sistem pemilihan presiden. Untuk substansinya, dalam konteks PBB pusat, sumber ini tergolong sumber primer. Adapun dalam konteks PBB di Kabupaten Bandung, sumber ini tergolong sumber sekunder..

13. *Pikiran Rakyat*, 8 Desember 2003, “24 Partai Ikuti Pemilu 2004”. Koran ini merupakan koran asli terbitan 8 juli 2003, yang kemudian di-*potocopy* oleh penulis. Berisi profil singkat partai yang ikut di pemilu tahun 2004. Untuk substansinya, dalam konteks PBB pusat, sumber ini tergolong sumber primer. Adapun dalam konteks PBB di Kabupaten Bandung, sumber ini tergolong sumber sekunder..

14. *Pikiran Rakyat*, 9 Desember 2003, “Pemilu 2004 Ajang Kebangkitan Umat Islam”. Koran ini merupakan koran asli terbitan 9 Desember 2003, yang kemudian di-*potocopy* oleh penulis. Berisi tentang profil partai Islam dalam menjelang pemilu tahun 2004. Koran ini termasuk sumber primer.

15. *Pikiran Rakyat*, 9 Desember 2003, “Parpol Terima Nomor”. Koran ini merupakan koran asli terbitan 9 Desember 2003, yang kemudian di-*potocopy* oleh penulis. Berisi tentang pembagian nomor urut partai untuk pemilu tahun 2004. Untuk substansinya, dalam konteks PBB pusat, sumber ini tergolong sumber primer. Adapun dalam konteks PBB di Kabupaten Bandung, sumber ini tergolong sumber sekunder.

### 3. Interpretasi

Tahap selanjutnya setelah tahap kritik ekstern dan intern adalah interpretasi. Interpretasi adalah menafsirkan fakta-fakta sejarah, dengan merangkai maksud dari fakta-fakta sejarah tersebut menjadi satu kesatuan maksud dan kesimpulan yang utuh.<sup>30</sup>

Fakta-fakta sejarah yang ditafsirkan di dalam penelitian sejarah semestinya harus fakta-fakta yang objektif . karena penulis sejarah tidak boleh membuat sejarah sendiri yang imajinasinya fakta-fakta sejarah menurut keinginan kecenderungan peribadinya.<sup>31</sup>

Maka penulis mencoba untuk se-objektif mungkin dalam melakukan interpretasi fakta-fakta yang telah terkumpul.

Penelitian ini memfokuskan pada sejarah berdirinya Partai Bulan Bintang, kemudian lebih spesifiknya membahas mengenai perkembangan Partai Bulan Bintang di Kabupaten Bandung tahun 1998-2004.

<sup>30</sup> Aam Abdillah, *Loc. Cit.*

<sup>31</sup> Ismaun, *Op. Cit.*, hlm. 59.

Adapun teori yang dipakai dalam mendasari penelitian ini salah-satunya adalah teori yang dikemukakan Samuel P. Huntington, yang menyatakan pentingnya kelembagaan politik yang kuat agar partai politik *survive* (bertahan hidup). Tolok ukurnya adalah tingkat adaptabilitas, kompleksitas, otonomi dan koherensi. Semakin tinggi derajat kelembagaan partai politik semakin memudahkan partai tersebut beradaptasi dengan lingkungannya. Umur, kompleksitas, tingkat otonomi, tingkat koherensi atau kepaduan organisasi, juga menjadi tolok ukur bagi kuatnya kelembagaan partai politik tersebut.<sup>32</sup>

Huntington kemudian mengkaji sistem kepartaian dari sudut institusionalisasi (pelebagaan). Yang dimaksud pelebagaan partai politik adalah proses pematapan partai politik baik dalam wujud perilaku yang mempola maupun dalam sikap atau budayanya. Huntington berpendapat bahwa dalam konteks pembangunan politik, yang terpenting bukanlah jumlah partai yang ada, melainkan sejauh mana kekokohan dan adaptabilitas<sup>33</sup> sistem kepartaian yang berlangsung. Suatu sistem kepartaian disebut kokoh dan adaptabel, yakni jika ia mampu menyerap dan menyatukan semua kekuatan sosial baru yang muncul sebagai akibat modernisasi. Dari sudut pandang ini, jumlah partai hanya akan menjadi penting apabila ia mempengaruhi kapasitas sistem untuk membentuk saluran kelembagaan yang diperlukan guna menampung partisipasi politik.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Samuel P. Huntington, *Tertib Politik di dalam Masyarakat yang Sedang Berubah* Terj. Sahat Simanora dkk., (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), hlm. 21.

<sup>33</sup> Adaptabilitas adalah kekuatan menyesuaikan diri suatu organisasi dalam menghadapi tantangan dan perubahan.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

Selain pendapat Huntington, teori yang dipakai juga adalah teori yang dikemukakan Ibn Khaldun tentang Siklus Sejarah. Menurut Khaldun suatu kehormatan atau kejayaan suatu kerajaan atau kekuasaan biasanya mencapai empat generasi, generasi awal yaitu pendiri (masa berdiri), pelanjut (masa puncak kejayaan), masa kemunduran, masa kehancuran.<sup>35</sup>

Dalam penelitian tentang “Perkembangan Partai Bulan Bintang di Kabupaten Bandung tahun 1998-2004” ini, penulis menjelaskan mengenai proses berdirinya Partai Bulan Bintang, kemudian mengkaji proses pendirian PBB Kabupaten Bandung, perkembangan, dan peranan PBB di Kabupaten Bandung dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2004, dengan kata lain dalam jangka waktu tersebut PBB sudah mengikuti dua kali pemilu, serta diuraikan juga mengenai langkah-langkah PBB ke depannya, terutama tercermin dalam muktamar-muktamarnya. Dari tahun 1998 PBB mulai berdiri dan masih bisa *survive* sampai sekarang, tentu saja bukan hal yang terlepas dari proses adaptasi dalam mempertahankan stabilitas kelembagaannya. Karena pastinya PBB menghadapi banyak kendala dan rintangan selama memperjuangkan tujuannya.

Apabila ditinjau secara historis kelahiran PBB sendiri, tidak bisa dipisahkan dari kondisi politik dalam negeri yang tidak stabil. Berakhirnya masa Orde Baru yang sekaligus menandai lahirnya era baru yakni era Reformasi. Membuat orang berduyu-duyun seperti keluar dari sarangnya dalam menyalurkan aspirasi yang selama masa Orde Baru ‘Dikekang’. Kondisi politik di Indonesia

---

<sup>35</sup> Ibn Khaldun, *Mukaddimah* Penj. Masturi Irham dkk., (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), hlm. 212-213.

pasca Orde Baru memang tidak stabil, orang-orang banyak yang mendirikan partai dimana-mana, partai saat itu seperti jamur di musim hujan, banyak sekali.<sup>36</sup> PBB lahir dari rahim berbagai organisasi yang dengan gigih memperjuangkan agar syari'at Islam bisa ditegakkan di bumi pertiwi ini. Organisasi-organisasi yang tergabung dalam BKUI, yang pada tanggal 17 Juli 1998 bersepakat untuk mendirikan Partai Bulan Bintang dan mendeklarasikannya pada tanggal 26 Juli 1998.<sup>37</sup>

Setelah berdirinya Partai Bulan Bintang pada tanggal 17 Juli 1998. Maka pada tahun itu juga, Partai Bulan Bintang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Pada tahun itu pula berdiri DPW dan DPC di berbagai wilayah di Indonesia, tanpat terkecuali daerah Kabupaten Bandung. Tokoh-tokoh PBB pusat yang berdomisili di Kabupaten Bandunglah yang menjadi deklarator didirikannya PBB di Kabupaten Bandung untuk meneruskan dan memperluas wilayah jangkauannya, dengan mengajak kawan-kawan seperjuangan dan sepemahaman untuk ikut bergabung memperjuangkan syari'at Islam dalam wadah Partai Bulan Bintang.<sup>38</sup> Dari mulai berdiri, DPC Kabupaten Bandung mengalami pasang surut, hal ini bisa dilihat dari jumlah suara pada pemilu yang telah dialami oleh PBB di Kabupaten Bandung. Tetapi, meskipun pasang-surut terjadi pada Partai Bulan Bintang, partai ini masih berdiri sampai saat ini meskipun kondisinya sangat berbeda dengan dulu ketika awal-awal pendiriannya.

---

<sup>36</sup> Azian Tamin dkk., *Loc. Cit.*

<sup>37</sup> *REPUBLIKA*, Edisi 27 Juli 1998, "Partai Bulan Bintang Ingin Presiden Dipilih Langsung"

<sup>38</sup> Wawancara dengan bapak H. Damini, Laki-laki, 62 tahun, Bendahara DPC PBB Kab. Bandung tahun 1998, 26 Oktober 2015.



Seperti yang dijelaskan di atas bahwa tidak lama dari awal beridiri DPP Partai Bulan Bintang, maka berdirilah DPW dan DPC di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Hal ini membuktikan animo masyarakat Islam khususnya atas pendirian partai yang berazaskan Islam ini. Begitupun halnya dengan DPC Kabupaten Bandung berdiri tidak lama dari didirikannya PBB pusat.<sup>39</sup>

Kabupaten Bandung adalah salah-satu penyumbang suara bagi PBB, terbukti dengan mendapatkannya 2 kursi pada Pileg tahun 1999.<sup>40</sup> Maka peranan DPC dalam menarik simpati ataupun melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai ideologi partai pun sangat penting sekali perannya.

Masyarakat pun memberikan respon yang baik terhadap sosialisasi yang dilakukan PBB . Hal ini menjadi sangat terlihat jelas ketika pemilu tahun 1999 dilaksanakan, yakni bagaimana peranan masyarakat dalam kampanye memberikan peranan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Pada pemilu 1999 masyarakat Kabupaten Bandung bahkan “udunan”<sup>41</sup> untuk kampanye di wilayah Kabupaten Bandung. Dibuktikan dengan memberi sumbangan-sumbangan bagi kemajuan partai baik berupa materi ataupun berupan moril.<sup>42</sup>

Perkembangan yang terjadi di Partai Bulan Bintang terlihat ketika membandingkan hasil pemilu tahun 1999 dan pemilu tahun 2004, yang akan penulis jadikan *sample* tentang perkembangan yang terjadi pada Partai Bulan

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Bapak Asep Anwar, laki-laki, 67 tahun, Ketua DPC PBB Kabupaten Bandung 2010-2015: Banjaran (Rumah Kediaman), 11 Oktober 2015.

<sup>40</sup> Lihat hasil pemilu tahun 1999 di Kabupaten Bandung.

<sup>41</sup> Uduan ini dari bahasa sunda yang artinya bersama-sama mengumpulkan dana.

<sup>42</sup> Wawancara dengan Bapak Asep Anwar, laki-laki, 67 tahun, Ketua DPC PBB Kabupaten Bandung 2010-2015: Banjaran (Rumah Kediaman), 11 Oktober 2015.

Bintang. Tahun 1998 mengenai proses berdirinya, adapun tahun berikutnya mengenai pemilu, setelah itu akan diteliti mengenai perkembangan yang terjadi pada Partai Bulan Bintang, terutama perbandingan dengan pemilu berikutnya.

Eksistensi PBB di Kabupaten Bandung bisa terlihat dari program-program yang dilaksanakan interval tahun 1998-2004. Program yang dilaksanakannya tidak terlepas dari apa yang dicanangkan oleh pusat, di antaranya adalah: mengadakan halaqah-halaqah, mengadakan pengajian, bantuan sosial, sosialisasi mengenai politik Islam dll.. Hal ini menjadi sangat bermanfa'at, ketika melihat pemilu tahun 1999, di Daerah Pilihan 7 (DP7)<sup>43</sup> PBB mampu menjadi 4 besar partai yang mendapatkan suara di sana.<sup>44</sup> Hal ini merupakan indikasi bahwa eksistensi partai melalui program-programnya membuahkan hasil yang nyata.

#### 4. Historiografi

Tahapan terakhir dalam penelitian sejarah adalah historiografi, secara bahasa historiografi adalah penulisan atau pelukisan sejarah, gambaran sejarah tentang peristiwa yang terjadi pada waktu yang lalu yang disebut sejarah.<sup>45</sup>

Dalam penulisan laporan ini, peneliti menggunakan penulisan historis, jenis penulisan ini mengungkapkan fakta-fakta guna menjawab pertanyaan yang dirumuskan dalam pertanyaan. Sistematika penulisan ini di klasifikasikan menjadi beberapa bagian, yaitu :

---

<sup>43</sup> DP7 ini mencakup Banjaran, Pamengpeuk, Baleendah dst.

<sup>44</sup> Lihat arsip pemilu di kab. Bandung tahun 1999

<sup>45</sup> Ismaun, *Op. Cit.*, hlm. 28.

Bab I yaitu pendahuluan yang didalamnya menguraikan beberapa kelompok mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka.

Bab II yaitu membahas tentang Partai Islam di Kabupaten Bandung tahun 1998, yang di dalamnya terdiri dari; Sekilas Tentang Kabupaten Bandung, Kemunculan Partai Politik Tahun 1998, Berdirinya PBB Pusat dan di Kabupaten Bandung tahun 1998, Visi, Misi, Asas dan Tujuan Pendirian PBB, Teori Tentang Partai Islam dan Respon Kader-kader Ormas Islam di Kabupaten Bandung terhadap berdirinya PBB di Kabupaten Bandung.

Bab III Perkembangan PBB di Kabupaten Bandung tahun 1998-2004 yang meliputi; Program-program PBB di Kabupaten Bandung tahun 1998 – 1999; Eksistensi PBB di Kabupaten Bandung tahun 1999; Kaderisasi dan Upaya Perekrutan Massa PBB di Kabupaten Bandung; Pemilu tahun 1999 di Kabupaten Bandung; Kiprah PBB di Kabupaten Bandung pada Pemilu tahun 1999; Program-program PBB di Kabupaten Bandung 2000-2004, Kiprah PBB di Kabupaten Bandung pada Pemilu tahun 2004 dan Prospek PBB Kabupaten Bandung.

Bab IV yaitu kesimpulan yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya.